

“PENYUSUNAN INDEKS KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANKA PENILAIAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERKINERJA BAIK”

Dr. Ardi Adji (08128988215)

Selasa, 26 Oktober 2021

LATAR BELAKANG

- Kedudukan Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 2 (dua) peran yaitu sebagai:
- Kepala Daerah → melaksanakan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan dan lintas Kabupaten/Kota
- Wakil Pemerintah Pusat → Merupakan representatif pemerintah pusat dalam membantu Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan berdasarkan UUD 1945, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terhadap lebih dari 514 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peran Gubernur sebagai Perwakilan Pememrintah Pusat

- Gubernur membantu Presiden melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
 - Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota;
 - Tugas dan wewenang lain yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUKURAN INDEKS KINERJA GUBERNUR SEBAGAI GWPP

- Ada 2 cara pengukuran keberhasilan kinerja
- 1. Internal → Indeks Kinerja Gubernur berdasarkan penilaian internal Kemendagri
- 2. Eksternal → Contoh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Gubernur

Penilaian internal : PERMENDAGRI 12 TAHUN 2021

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Fungsi, Sasaran, **Output, Outcome** dan Tahapan Aktivitas GWPP
 - Sekretariat
 - Unit Kerja Bidang Pemerintahan
 - Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi
 - Unit Kerja Bidang Keuangan
 - Unit Kerja Bidang Perencanaan
 - Unit Kerja Bidang Pengawasan

TUJUAN PENYUSUNAN **INDEKS KINERJA GUBERNUR**

- Tujuan penyusunan **Indeks kinerja Gubernur** adalah mengukur peningkatan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
- Indeks GWPP akan dimanfaatkan Kemendagri sebagai indikator sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri

KARAKTERISTIK INDEKS GWPP

Belajardaripembuatan indeks-indeks yang pernah ada sebelumnya



UKURAN KEBERHASILAN

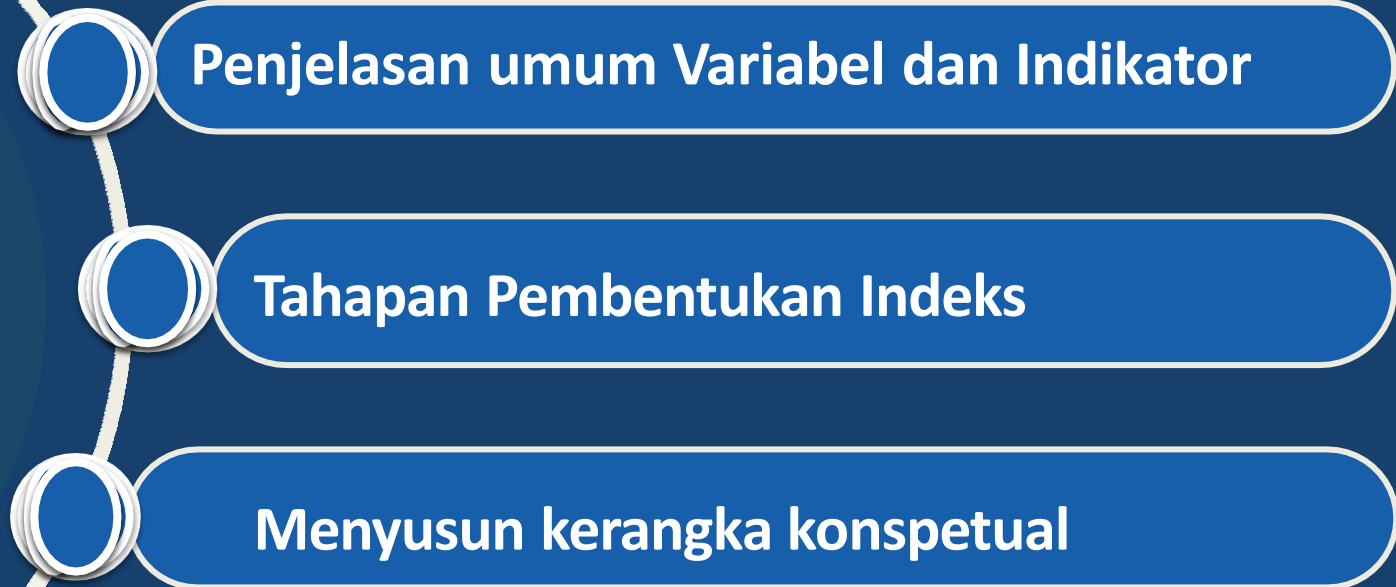
- Ukuran Keberhasilan dari sisi
 - Input
 - Proses
 - Output
 - Outcome

Membangun Indeks Komposit

- **Contoh:** Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Disebutkan Permenpan-RB 14/2017

Bagaimana Membangun Indeks Komposit

TAHAPAN PEMBENTUKAN INDEKS KINERJA GWPP



VARIABLE DAN INDIKATOR

Variabel:

- Sesuatu yang memiliki nilai berbeda (Brown, 1998)
- Simbol/konsep yg diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai (Davis, 1998)

Indikator:

- Variabel untuk mengevaluasi keadaan atau pengukuran thp perubahan yang terjadi
- Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara “gamblang” hanya indikasi tentang keadaan

FUNGSI INDIKATOR

- Memberikan panduan untuk pembuat kebijakan
- Mengukur progress
- Memberikan *early warning*
- Memonitor *output* dari *banchmark*
- Evaluasi untuk tindakan selanjutnya
- Memprediksi hasil di masa datang
- Capaian antardaerah atau antarwaktu

INDIKATOR TUNGGAL & KOMPOSIT

- Indikator tunggal, mengukur **satu aspek**, contoh: Angka Melek Huruf mengukur kemampuan baca tulis
- Indikator (indeks) Komposit , mengukur dari **berbagai aspek**, contoh: IPM dihitung dari 4 indikator:
 - Angka Harapan Hidup;
 - Rata-rata Lama Sekolah;
 - Harapan Lama Sekolah; dan
 - Pengeluaran per Kapita

INDEKS KOMPOSIT

Keunggulan

- menggambarkan permasalahan kompleks dgn cara sederhana → simplifikasi
- mudah dipahami sebagai tolok ukur kinerja/pencapaian suatu wilayah

Kelemahan

- salah interpretasi (*misinterpreted*)
- melibatkan model matematik/*statistic* yang bisa memberikan hasil yang berbeda-beda
- kebijakan yang menyesatkan (*misleading*) jika tidak disusun dengan benar

TAHAP 1: MENYUSUN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Mendefinisikan secara jelas dan gamblang fenomena apa yang ingin diukur
2. Mengidentifikasi dimensi atau aspek yang ingin diukur → indeks bersifat **multidimensi**
3. Menentukan dengan indikator apa fenomena itu mampu diukur?

*Apa yang ingin diukur? **Bukan** Indikator apa yang tersedia?*

Permendagri 12 tahun 2021

TAHAP 2: IDENTIFIKASI INDIKATOR

1. Menerjemahkan **tujuan** pengukuran indeks
2. Memahami konsep kondisi **multidimensi** yang akan diukur
3. Membuat struktur (pengelompokan) dari fenomena yang akan di jelaskan
4. Membuat daftar **kriteria** untuk pemilihan variable/indicator



Identifikasi indicator dengan
brainstorming

PENENTUAN INDIKATOR MELALUI KAJIAN REGULASI DAN TEORI, KAJIAN PROGRAM, FGD DAN INTERVIEW, DAN ANALISIS DATA

1. Kajian regulasi dan teori
2. Kajian input program/ kegiatan GWPP
3. Mengidentifikasi fisibilitas data
4. Diskusi Internal Kemendagri
5. FGD dengan para ahli dan stakeholder di luar Kemendagri
6. Uji validitas dan reliabilitas
7. Indikator Final

JENIS INDIKATOR

- Indikator **input**, biasanya merupakan ukuran dari masukan/bahan/materi pendukung suatu proses
- Indikator **proses**, mengukur bagaimana sebuah tingkat penyediaan/proses/pelayanan disediakan untuk mencapai hasil
- Indikator **output**, menunjukkan seberapa besar kuantitas yang dihasilkan
- Indikator **dampak**, sebuah ukuran yang lebih luas dari hasil yang telah dicapai

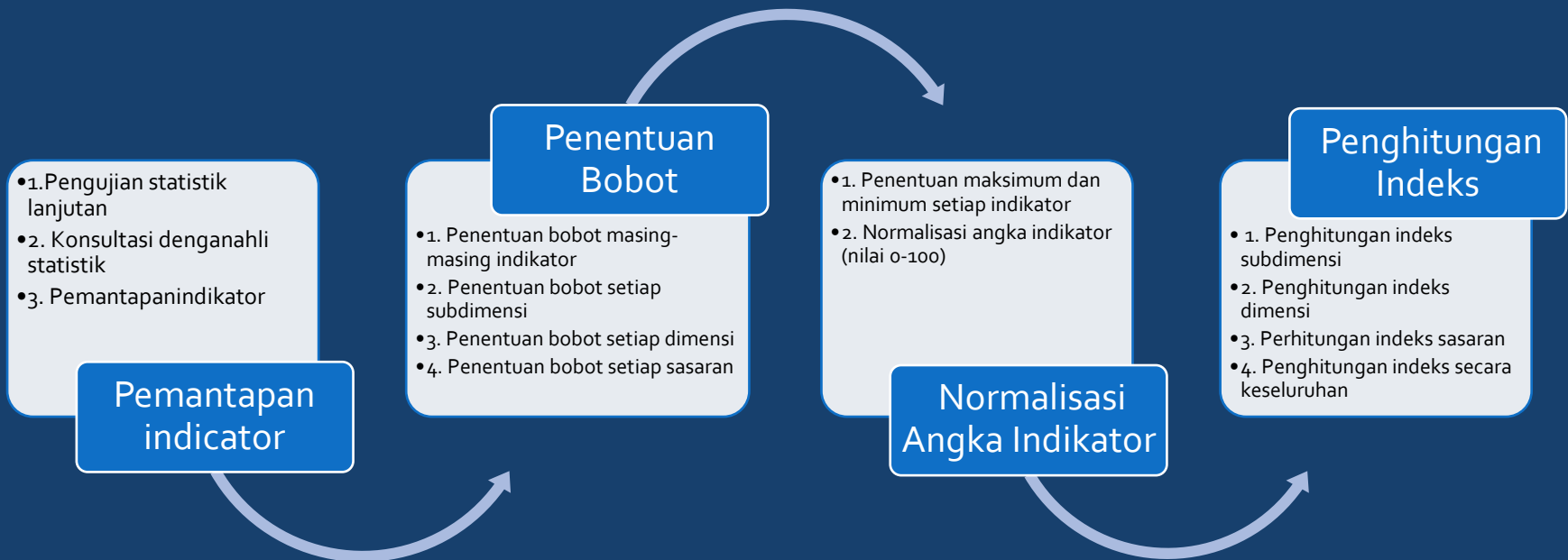
KRITERIA

- *Relevance*: Apakah sebuah indikator relevan dan bernilai bagi pengukuran pembangunan?
- *Predictive*: Apakah sebuah indikator mampu memberikan peringatan dini (*early warning*) tentang suatu kondisi?
- *Goal driven*: Apakah sebuah indikator benar-benar mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan?
- *Coverage*: Apakah sebuah indikator berkaitan dengan isu secara luas atau hanya sebagian kecil wilayah?
- *Understandable*: Apakah arti dan makna dari sebuah indikator dapat dipahami, apakah metode, interpretasi, tampilan dimengerti?

TIPS MENGIDENTIFIKASI/MEMILIH INDIKATOR

- Memeriksa kualitas dari indikator yang tersedia
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap indikator terpilih
- Membuat tabel kesimpulan mengenai karakteristik data (ketersediaan, sumber, jenis)

LANGKAH PERHITUNGAN INDEKS GWPP



DAFTAR INDIKATOR GWPP

SELANJUTNYA DILAKUKAN UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Indikator Output/Outcome Kinerja Bidang

1. Sekretariat
2. Unit Kerja Bidang Pemerintahan
3. Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi
4. Unit Kerja Bidang Keuangan
5. Unit Kerja Bidang Perencanaan
6. Unit Kerja Bidang Pengawasan

INDEKS PENILAIAN KINERJA GWPP (PERMENDAGRI 12/2021)



CONTOH DAFTAR TUGAS GWPP

1. Monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
2. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota;
3. Pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya (Melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional);
5. Memberikan rekomendasi atas usulan DAK Kabupaten/Kota di wilayahnya;
6. Koordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/kota;
7. Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya (Pengawasan Capaian SPM);
8. Mengevaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat .

CONTOH: MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA YANG DILAKSANAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI;

Sasaran		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi
Output		Laporan dan rekomendasi
Outcome		<ol style="list-style-type: none">1) Mendorong terselenggaranya kerjasama antar Kabupaten/Kota;2) Tersusunya kerjasama daerah yang efektif, efisien dan membawa manfaat bagi kemajuan wilayah;3) Meningkatkan kualitas kerjasama antar Kabupaten/Kota;4) Terjaganya kualitas perjanjian kerjasama sehingga tidak memicu konflik antar wilayah Kabupaten/Kota;

CONTOH: EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

Sasaran		Terlaksananya evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota
Output		Laporan evaluasi LPPD Kabupaten/Kota
Outcome		<ol style="list-style-type: none">1) Terevaluasinya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;2) Tersusunnya penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;3) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;4) Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

CONTOH: INDIKATOR_PEMERINTAHAN

TUGAS DAN WEWENANG	ASPEK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (PER ASPEK TOTAL 100%)	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT INDIKATOR
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyiapan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.	Aspek Pelaksanaan	40	Melaksanakan inventarisasi rencana pembentukan instansi vertikal	10
			konfirmasi pembentukan instansi vertikal	10
			penyusunan laporan dan rekomendasi	20
	Aspek Hasil dan Pelaporan	60	Hasil Inventaris Data Pelaksanaan Tugas dan Wewenang	10
			Hasil Data dan Analisa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang berdasarkan Instrumen Pelaksanaan Tugas	10
			Surat Rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal yang disampaikan kepada pemerintah pusat	20
			Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam pemberian rekomendasi pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.	20

CONTOH: INDIKATOR_HUKUM

NO	TUGAS DAN WEWENANG	ASPEK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (PER TUGAS TOTAL 100%)	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memberikan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/walikota	Aspek Pelaksanaan	40	Inventarisasi peraturan bupati/walikota	15
				Konfirmasi hasil analisis kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terkait dengan peraturan bupati/ walikota	10
				Penyusunan Laporan dan rekomendasi	15
		Aspek Hasil dan Pelaporan	60	Hasil Inventaris Data Peraturan Bupati/ Walikota	15
				Hasil Data dan Analisa Peraturan Bupati/ Walikota yang tidak relevan/ bertentangan dengan ketentuan perundangan dan urgensi pembangunan	15
				Hasil rekomendasi pembatalan Peraturan Bupati/ Walikota	20
				Laporan Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka Memberikan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/walikota	10

TAHAP 4: PENGOLAHAN DAN IMPUTASI DATA YANG TIDAK TERSEDIA

Mengapa imputasi?

- Indeks komposit memerlukan ketersediaan data set yang lengkap (tidak ada *missing value*)

Langkah:

1. Melihat *trend* tahunan
2. Interpolasi
3. Melihat data wilayah terdekat atau wilayah induk
4. Membuat model seperti regresi

Catatan:

- Realibilitas dari ukuran yang digunakan untuk imputasi data (dapat berpengaruh pada indikator komposit)
- Perhatikan pula adanya *outlier* dari data set

TAHAP 5: TANDARDISASI

Mengapa?

Standardisasi diperlukan atas data yang memiliki **unit-unit pengukuran berbeda**

Langkah:

- Prosedur standardisasi yang sesuai dengan kerangka kerja teoritis

Metode menurut Freudenberg (2003) dan Jacobs et al., (2004)

1. Ranking
2. **Standardisasi (Z-Skor)**
3. **Min-Max**
4. *Distance to Reference*
5. Skala Kategorik
6. Indikator di atas atau di bawah rata-rata
7. Indikator siklis
8. Keseimbangan opini
9. Persentase perbedaan dengan tahun sebelumnya

TAHAP 6: PEMBOBOTAN

Mengapa?

Setiap indikator atau sub indeks memiliki tingkat kepentingan yang tidak selalu sama atau bisa juga dianggap “sama penting”

Dasar pembobotan:

Kepentingan indikator, kualitas data, ketersediaan data (adanya indikator proksi)

Metode :

1. Equal weighting
2. Analisis Factor/ Analisis Komponen Utama (PCA)
3. Analisis Proses Hirarki/Analytic Hierarchy Process (AHP)
4. Analytic Network Process (ANP)
5. Lain-lain

TAHAP 7: AGGREGASI

Mengapa perlu agregasi?

Untuk mendapatkan nilai indeks (*summary*) atau agregat komponen

Metode Umum:

1. Linear (LA)
 2. Geometrik (GA)
 3. Harmonis (HA)
- Metode agregasi linier (*Linear Aggregation/LA*), digunakan jika setiap indikator memiliki ukuran yang sama dan berdasarkan pada proporsionalitas bobot indikator, sedangkan GA digunakan pada pembentukan indeks komposit yg mengagregasikan skor2 bernilai tinggi.
 - Dalam LA, pengaruh perbedaan nilai indikator bersifat konstan, sedangkan dalam GA, pengaruh tersebut akan sangat rendah untuk indikator yang nilainya rendah

TAHAP 8: UJI KEKUATAN DAN KEPEKAAN (*ROBUSTNESS*)

Mengapa?

1. Kekuatan dari indikator komposit perlu diuji dari adanya kombinasi berbagai kemungkinan alternatif.
2. Kekuatan dari indikator komposit perlu diuji kepekaannya (sensitivitasnya)

Metode:

Mencoba beberapa variable/indikator, proses imputasi data, normalisasi, penimbang dan metode agregasi yang berbeda

BOBOT INDEKS GWPP

No	Unit Kerja	Bobot
1	Bidang Pemerintahan	20%
2	Bidang Hukum Organisasi	20%
3	Bidang Keuangan	20%
4	Bidang Perencanaan	20%
5	Bidang Pengawasan	20%
Total		100%

KATEGORI INDEKS GWPP

NO	KATEGORI	NILAI/ ANGKA	PREDIKAT
1	AA	> 90	ISTIMEWA
2	A	80-90	SANGAT BAIK
3	BB	70-80	BAIK
4	B	60-70	CUKUP BAIK
5	CC	50-60	CUKUP
6	C	30-50	BURUK
7	D	0-30	SANGAT BURUK

DIMENSI_PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	TERKAIT	ASPEK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (100%)	NO URUT	SUBINDIKATOR	BOBOT INDIKATOR		ADA TIDAK	TOTAL NILAI EVIDENCE	JUMLAH NILAI INDIKATOR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
1	Penyiapan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH (Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I-IV)	Aspek Pelaksanaan	40	1	Melaksanakan inventarisasi rencana pembentukan instansi vertikal	10	Kompilasi pembentukan instansi vertikal	1		10	82,5
					2	Konfirmasi pembentukan instansi vertikal	10	Minutes Of Meeting, Notulensi, Risalah	0,5		5	
					3	Penyusunan laporan dan rekomendasi	20	Rancangan Laporan	1		20	
			Aspek Hasil dan Pelaporan	60	1	Hasil Inventaris Data Pelaksanaan Tugas dan Wewenang	10	Komplikasi Data Pelaksanaan Tugas dan Wewenang	0,75		7,5	
		2			Hasil Data dan Analisa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang berdasarkan Instrumen Pelaksanaan Tugas	10	Data dan Analisis	1		10		
		3			Surat Rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal yang disampaikan kepada pemerintah pusat	20	Persetujuan pembentukan instansi vertikal	0,5		10		
		4			Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam pemberian rekomendasi pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945	20	Laporan pelaksanaan pembentukan instansi vertikal	1		20		

DIMENSI_HUKUM DAN ORGANISASI

NO	INDIKATOR	UNIT KERJA TERKAIT	ASPEK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (PER TUGAS TOTAL 100%)	NO URUT	SUBINDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	EVIDENCE			TOTAL NILAI EVIDENCE	JUMLAH NILAI INDIKATOR
									AD A	TIDAK		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
1	Memberikan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/walikota	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH (Direktorat PHD)	Aspek Pelaksanaan	40	1	Inventarisasi peraturan bupati/walikota	15	Kompilasi Peraturan	1		15	95
					2	Konfirmasi hasil analisis kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terkait dengan peraturan bupati/walikota	10	Minutes Of Meeting, Notulensi, Risalah	0,5		5	
					3	Penyusunan Laporan dan rekomendasi	15	Rancangan Laporan	1		15	
			Aspek Hasil dan Pelaporan	60	4	Hasil Inventaris Data Peraturan Bupati/ Walikota	15	Rancangan Analisis dan Evaluasi	1		15	
					5	Hasil Data dan Analisa Peraturan Bupati/ Walikota yang tidak relevan/ bertentangan dengan ketentuan perundangan dan urgensi pembangunan	15	Rancangan Analisis dan Evaluasi	1		15	
					6	Hasil rekomendasi pembatalan Peraturan Bupati/ Walikota	20	Kajian dan Analisis	1		20	
					7	Laporan Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka Memberikan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/walikota	10	Laporan rekomendasi	1		10	

DIMENSI_KEUANGAN

NO	INDIKATOR	UNIT KERJA TERKAIT	ASPEK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (PER ASPEK TOTAL 100%)	NO URUT	SUBINDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	EVIDENCE			TOTAL NILAI EVIDENCE	JUMLAH NILAI INDIKATOR
									ADA	TIDAK		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
1	Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH (PAD)	Aspek Pelaksanaan	40	1	Inventarisasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	10	Kompilasi Rancangan Perda	1		10	86,3
					2	Konfirmasi hasil identifikasi dan analisis rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	15	Minutes Of Meeting, Notulensi, Risalah	0,5		7,5	
					3	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi	15	Draf/ Rancangan Laporan	0,75		11,3	
			Aspek Hasil dan Pelaporan	60	4	Hasil Inventaris rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	20	Rancangan Analisis dan Data APBD	1		20	
					5	Hasil Data dan Analisa rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	10	Draf/ Rancangan Laporan	0,75		7,5	
					6	Hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	10	Laporan Pelaksanaan	1		10	

DIMENSI_PERENCANAAN

NO	INDIKATOR	UNIT KERJA TERKAIT	ASPEK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (PER ASPEK TOTAL 100%)	NO URUT	SUBINDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	EVIDENCE			TOTAL NILAI EVIDENCE	JUMLAH NILAI INDIKATOR (%)
									ADA	TIDAK		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
1	penyelarasan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayahnya	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH (PEIPD)	Aspek Pelaksanaan	40	1	Inventarisasi dokumen perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Kota	15	Kompilasi dokumen perencanaan	1		15	90
					2	Konfirmasi hasil analisis perencanaan pembangunan yang melibatkan antar wilayah Kab/Kotadan antaraProvinsi dan Kab/Kota	5	Minutes Of Meeting, Notulensi, Risalah	0,5		2,5	
					3	Penyusunan laporan dan rekomendasi pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan yang melibatkan antar wilayah Kab/Kotadan antaraProvinsi dan Kab/Kota	20	Draf/ Rancangan Laporan	0,75		15	
			Aspek Hasil dan Pelaporan	60	4	Hasil Inventaris Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi	20	Analisis dan Data	1		20	
					5	Hasil analisis permasalahan, potensi perencanaan pembangunan yang melibatkan Kabupaten/Kota dan Provinsi	10	Draf/ Rancangan Laporan	0,75		7,5	
					6	Hasil rekomendasi penyelarasan perencanaan pembangunan yang melibatkan antar wilayah Kab/Kotadan antaraProvinsi dan Kab/Kota	15	Laporan pelaksanaan	1		15	
					7	Laporan Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka Penyelarasan perencanaan pembangunan yang melibatkan antar wilayah Kab/Kota dan antaraProvinsi dan Kab/Kota	15	Laporan pelaksanaan dan evaluasi	1		15	

DIMENSI_PENGAWASAN

NO	INDIKATOR	UNIT KERJA TERKAIT	ASPEK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (PER ASPEK TOTAL 100%)	NO URUT	SUBINDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	EVIDENCE			TOTAL NILAI EVIDENCE	JUMLAH NILAI INDIKATOR
									ADA	TIDAK		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
1	Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT JENDERAL	Aspek Pelaksanaan	40	1	Inventarisasi Laporan kinerja Kepala Daerah Kabupaten/Kota	5	Kompilasi laporan kinerja	1		5	93,8
					2	Konfirmasi hasil analisis penilaian kinerja bupati/walikota	5	Minutes Of Meeting, Notulensi, Risalah	0,5		2,5	
					3	Pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah	15	Penghargaan /Sanksi	1		15	
					4	Penyusunan Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15	Draf/ Rancangan Laporan	0,75		11,3	
			Aspek Hasil dan Pelaporan	60	5	Hasil Inventaris Kinerja kepala daerah/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15	Analisis dan Data	1		15	
					6	Hasil Data dan Analisa analisis penilaian kinerja Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	10	Analisis dan Data	1		10	
					7	Piagam Penghargaan/ Surat Keputusan Pengenaan Sanksi terhadap Bupati/Walikota	15	Surat Keputusan/ Piagam Penghargaan	1		15	
					8	Laporan Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20	Laporan Pelaksanaan dan pemberian penghargaaa n atau sanksi	1		20	

INDEKS GWPP

No.	Dimensi Nilai	Nilai
1.	Dimensi Pemerintahan	91,8
2.	Dimensi Hukum dan Organisasi	93,4
3.	Dimensi Keuangan	87,5
4.	Dimensi Perencanaan	90,0
5.	Dimensi Pengawasan	94,3
Jumlah		91,4

TERIMAKASIH